

FILSAFAT SOSIAL-POLITIK PLATO DAN ARISTOTELES

Alim Roswantoro
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Plato and Aristoteles have a teacher-student relationship. And both philosophers have the same teacher, that is, a great philosopher of the classic Greek, Socrates. Both philosophers talk many things in philosophy, and one of them is the social-political thought. The writing tries to comparative-philosophically describe the social-political thought of Plato and Aristotle that can be read in their works particularly in *Republic*, *Laws*, and *Statesman* of Plato, and in *Nicomachean Ethics* and *Politics* of Aristotle. The result of study shows that the main idea of their social-political philosophies is to create and maintain a just city-state providing the happiness for all citizens. But, both philosophers differ in respect of the way of embodying it. In Plato's thought, a just city-state occurs under the guidance of the light of ideal knowledge and virtue produced by philosophers-kings. Whereas for Aristotle, it happens because of the human-instinctive process as social-political creature. It takes place as long as the city-state is able to condition its citizens to be the good people.

Key words: City-state, Justice, Happiness

Plato dan Aristoteles adalah guru dan murid, dan keduanya memiliki guru yang sama, yaitu filosof besar Yunani Kuno, Socrates. Keduanya merupakan filosof yang berbicara tentang banyak hal, dan salah satunya adalah tentang pemikiran sosial-politik. Filsafat sosial politik Plato dan Aristoteles sangat dikenal di dunia pemikiran. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan pemikiran sosial-politik Plato dan Aristoteles secara komparatif-filosofis. Analisis difokuskan pada pikiran-pikiran sosial-politik keduanya dalam karya-karya utama mereka, yaitu *Republic*, *Laws*, dan *Statesman*-nya Plato, dan *Nicomachean Ethics* dan *Politics*-nya Aristoteles. Hasil kajian memperlihatkan bahwa ide utama filsafat sosial-politik Plato dan Aristoteles adalah menciptakan suatu negara-kota yang adil yang memberikan kebahagiaan bagi semua warganya. Keduanya berbeda dalam hal cara mewujudkannya. Dalam pemikiran Plato, negara-kota yang adil terjadi di bawah bimbingan sinar pengetahuan ideal yang dihasilkan raja-filosof. Sedangkan menurut Aristoteles, ia terjadi karena proses instingtif manusia sebagai makhluk sosial. Ia terjadi selama negara-kota mampu mengondisikan semua warganya sebagai orang-orang yang baik.

Kata kunci: Negara-kota, Keadilan, Kebahagiaan

A. Pendahuluan

Filsafat sosial politik merupakan gabungan antara filsafat sosial dan politik. Filsafat sosial, menurut Blackburn, adalah kajian menyeluruh dan komprehensif tentang masyarakat bagaimana ia ada dan seharusnya ada.¹ Ellwood memahami filsafat sosial sebagai pemikiran tentang hubungan-hubungan antar manusia (*human relations*), bagaimana asal-usul, arah dan strukturnya yang seharusnya untuk kesejahteraan manusia (*human welfare*).² Sementara filsafat politik merupakan analisis kritis atas kajian-kajian mengenai kekuasaan dan lembaga utamanya yang bernama negara. Menurut Laslett, filsafat politik terkadang dianggap membatasi dirinya sendiri pada entitas partikular yang disebut “negara”, tetapi sebenarnya para filosof politik sendiri selalu berkenaan dengan kolektivitas sebagai suatu keseluruhan, bahkan menggambarkan suatu perbedaan antara “negara” dan “masyarakat”.³ Namun kolektivitas yang dimaksudkannya tampaknya memiliki otoritas kekuasaan yang memaksa kepada hubungan-hubungan politik antar warga negara-negara dan masyarakat-masyarakat yang ada di dunia ini. Ini semacam negara yang mengatasi negara-negara yang ada. Filsafat sosial-politik adalah kajian kritis atas pandangan yang seharusnya mengenai masyarakat dan sekaligus mengenai kekuasaan otoritatif yang berkekuatan memaksa dalam mengatur banyak orang dengan ragam kepentingan dalam suatu wilayah agar cita-cita mengenai suatu masyarakat ideal tercapai.

Kehidupan sosial-politik di Yunani Kuno tidak terlepas dari upaya-upaya dari warga-warganya untuk mewujudkan suatu masyarakat ideal di bawah suatu sistem kerja kekuasaan yang ideal pula. Socrates, dengan perilaku satrianya mempertahankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran dan kebijaksanaan harus berhadapan dengan eksekusi mati dari penguasa Athena, secara tidak langsung telah memberikan kritik tajam terhadap kehidupan sosial dan politik negara Athena yang bersifat otoriter terhadap kebebasan berpikir warganya. Upayanya telah menginspirasi dua muridnya, Plato dan Aristoteles. Di antara banyak karya pemikirannya, keduanya telah menyumbangkan suatu pandangan filosofis mengenai bagaimana seharusnya kehidupan sosial-politik dalam kehidupan masyarakat keduanya. Terdapat persamaan-persamaan dan sekaligus perbedaan-perbedaan pemikiran dalam filsafat sosial-politik keduanya. Tulisan ini berupaya memaparkan filsafat sosial-politik keduanya dan kemudian menganalisis keduanya secara komparatif serta mencoba memberi alasan-alasan mengapa keduanya berbeda; di samping persamaan yang ada.

¹ Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy* (Oxford, New York: Oxford University Press, 1994), 305.

² Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy* (New York: AMS Press, 1969), vii.

³ Peter Laslett and Philip W. Cummings, “History of Political Philosophy” dalam Paul Edwards (ed. in chief), *The Encyclopedia of Philosophy* (New York & London: The Macmillan Company & The Free Press & Collier-Macmillan Limited, 1967), 370. Dalam tulisan ini Laslett menulis dari *Introduction* sampai Kant, sementara Cummings dari Hegel sampai *recent political thoughts*.

B. Kehidupan dan Sumbangan Intelektualnya

Plato dilahirkan kira-kira pada tahun 427 S.M. dan meninggal dunia pada tahun 327 S.M. Dia lahir dan tumbuh di tengah-tengah keluarga aristokrasi kuno Athena. Tidak heran, dia sangat tertarik dengan hal-hal yang bersifat aristokratik. Dia dilahirkan pada masa seorang filosof yang dikenal sebagai pejuang kebenaran sejati, karena dengan berani mengorbankan nyawanya demi kebenaran yang dipegangnya, yaitu Socrates.⁴

Dia beruntung lahir pada masa Socrates, karena bisa belajar darinya. Plato adalah murid Socrates yang cerdas dan memiliki minat filsafat yang sama tingginya dengan gurunya. Sepeninggal Socrates karena dieksekusi penguasa masyarakat di mana dia tinggal, Plato, mengikuti saran gurunya untuk pergi dengan tujuan agar ajaran gurunya tetap hidup melalui murid-muridnya meski gurunya telah tiada, melakukan perjalanan panjang dari negara ke negara. Dia melakukan serangkaian perjalanan yang panjang, dari mengunjungi Mesir, Asia Kecil, Sisilia, dan Italia Bagian Selatan. Karena perjalanan jauh ini, pikiran-pikiran briliannya sangat dikenal di dunia Mediteranian di masanya. Di Italia dia berjumpa dengan aliran filsafat Pythagoras.⁵

Pada tahun 287 SM. dia kembali ke Athena, Yunani, mendirikan Akademi yang kemudian sangat terkenal, karena banyak intelektual muda Yunani tertarik dan belajar di Akademi tersebut bersamanya. Akademi ini sering dianggap para ahli sejarah sebagai perguruan tinggi pertama yang berdiri di Eropa. Empat puluh tahun terakhir dari usianya yang lebih dari delapan puluh tahun dihabiskan Plato untuk menulis dan mengajar.⁶

Dia kemudian sangat tertarik dengan pemikir-pemikiran sosial dan politik. Tiga karyanya, *Republic*, *Statesman*, and *Laws* adalah tiga dari tiga puluh lima tulisan dialog-dialog Plato yang menggambarkan kontribusinya pada pemikiran filsafat sosial dan politik pada masanya.⁷ Yang terpenting dari ketiganya adalah *Republic* yang di dalamnya Plato menjelaskan tentang negara-kota yang adil dan keharusan raja atau pemimpin yang filosof yang menjamin keadilan itu terjadi.⁸

Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 S.M. di Stagirus, yang kemudian dikenal dengan Stagira, kota kecil yang ada di sudut timur-utara kepulauan Chalcidice. Karena bapaknya, yang seorang fisikawan yang menghabiskan waktunya di pengadilan Macedonia Pella, meninggal dalam usia muda, Aristoteles dibesarkan oleh keluarganya di Atarneus di Asia Kecil.⁹

⁴ Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy*, 18.

⁵ *Ibid.* 7-8.

⁶ Will Durant, *The Story of Philosophy. The Lives and Opinions of the World's Greatest Philosophers from Plato to John Dewey*, (New York: Pocket Books, Inc., 1954), 28.

⁷ Leo Strauss and Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy* (Chicago and London: The University Chicago Press, 1973), 7.

⁸ George Klosko, "Politics and Method in Platos's Political Theory", *Journal POLIS*, Vol. 23, 2006: 3-4.

⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. with introd. and notes by Martin Ostwald (Indianapolis, New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1962), xi.

Pada usia ketujuhbelas tahun, tepatnya tahun 387 SM., Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato.¹⁰ Dia belajar pada dan menjadi murid Plato yang menonjol. Meskipun dia belajar dengan Plato, namun pemikirannya tidaklah Platonian, justru sangat banyak menunjukkan suatu kritik terhadap pemikiran gurunya dan melahirkan suatu filsafat yang lebih condong ke realisme daripada aliran filsafat gurunya, idealisme.

Sepeninggal Plato, Aristoteles meninggalkan Athena dan kehidupannya lebih banyak di lingkungan kekuasaan atau kerajaan karena memenuhi undangan para penguasa seperti Hermias yang berkuasa di Atarneus. Pada tahun 343 SM., Aristoteles diundang oleh Raja Macedonia, Philip II, untuk datang ke Pella untuk suatu tugas, yaitu menjadi pengajar Aleksander, seorang pangeran yang kemudian menjadi raja besar dalam sejarah Yunani yang sangat menyintai ilmu pengetahuan.¹¹

Di antara karya-karya penting Aristoteles adalah *Metaphysics*, *Physics*, *Politics*, dan *Nicomachean Ethics*. Pemikiran Aristoteles bersifat ensiklopedik, banyak hal yang dia tulis, namun yang selalu dirujuk sebagai sumbangan pemikiran dalam filsafat sosial dan juga politik adalah *Politics* dan *Nicomachean Ethics*.¹²

C. Bangunan Filsafat Sosial-Politik Plato

Filsafat sosial-politik Plato berangkat dari kepercayaan adanya suatu gagasan tentang masyarakat ideal. Bicara masyarakat ideal, dalam pemikiran Plato, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep manusia ideal. Masyarakat ideal hanya berupa semacam perluasan dari konsep ideal manusia. Karena idealismenya, Plato mengatakan bahwa masyarakat manusia harus disamakan dengan pikiran manusia daripada dengan ketubuhan manusia.

Ada tiga level aktivitas dalam hakikat manusia, yaitu aktivitas nafsu dan penginderaan, semangat atau kehendak, dan intelegensi atau akal atau jiwa. Level pertama dari hakikat manusia dalam masyarakat ditemukan dalam bentuk kelas orang-orang yang menundukkan diri mereka pada kepuasan inderawi dan kepuasan nafsu-nafsu ketubuhan mereka. Level kedua dari hakikat manusia dalam masyarakat ditemukan dalam bentuk kelas orang-orang yang menundukkan diri mereka pada tindakan-tindakan demi kehormatan dan tanda penghargaan. Akhirnya, level ketiga dari hakikat manusia dalam masyarakat ditemukan dalam bentuk kelas orang-orang yang menundukkan diri mereka pada pengolahan intelek dan pengejaran kebenaran.¹³ Ketiga tipe manusia ini dalam masyarakat menjalankan fungsi dan kerjanya masing-masing.

Tipe pertama, mereka yang puas dengan urusan-urusan pemenuhan nafsu dan kebutuhan jasmani manusia menjadi kelas pekerja yang berfungsi menyediakan dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Plato, *Republic*, trans. from the standard Greek text, with introd., by C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing, Inc., 2004), 437b, 580d.

memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan fisik masyarakat. Mereka ini dalam masyarakat disebut kelas para pekerja manual dan tukang. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian dan mekanika atau pertukangan. Selain itu, mereka juga melakukan perniagaan dan perdagangan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik dan nafsu masyarakat manusia. Plato merujuk mereka ini sebagai pembuat atau penyinta uang (*money makers or lovers*), karena mereka mengejar uang cara terbaik untuk memuaskan keinginannya atas kesenangan hidup.¹⁴

Tipe kedua, sekelompok manusia dalam masyarakat yang puas dengan perbuatan-perbuatan demi mendapatkan penghormatan dan penghargaan merupakan kelas sosial kedua yang bertugas melindungi masyarakat. Kelas ini adalah kelas para tentara yang bertugas melindungi masyarakat dari ancaman invasi dan guncangan-guncangan internal dalam masyarakatnya. Tipe ketiga, orang-orang yang menundukkan dirinya pada intelegensi dan pemikiran, dalam masyarakat, berfungsi melakukan tugas mengatur kehidupan masyarakat. Mereka adalah kelas sosial yang terdiri dari para hakim dan penguasa yang bertugas mengawasi dan mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat.¹⁵

Ketiga kelas sosial-politik, yaitu para pencari kesenangan duniawi atau *the money makers*, para pelindung masyarakat karena keberanian mereka atau *the warriors*, dan orang-orang yang karena kecerdasan dan kebijaksanaan mereka melakukan tugas mengatur kehidupan sosial-politik dalam keseluruhannya atau *the rulers*, menentukan berjalannya masyarakat politik berjalan adil atau tidak. Masyarakat politik berjalan adil apabila masing-masing kelas sosial-politik menjalankan hanya pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing.¹⁶

Kelas sosial para pekerja tangan dan tukang, karena berorientasi pada kepentingan dan kesenangan diri, memiliki kehidupan keluarga pribadi dan hak kepemilikan pribadi yang terbatas. Mereka tidak diharapkan oleh masyarakat atau negara untuk menggabungkan kehidupan mereka sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat atau negara.¹⁷

Kelas sosial para warganegara tentara yang memiliki tugas melindungi dan mengamankan negara dari ancaman dan pemberontakan dari luar hidup dalam kepentingan umum masyarakat atau negara. Orientasi hidup mereka didedikasikan untuk umum, dan karenanya mereka tidak memiliki kehidupan pribadi. Satu-satunya kebahagiaan mereka adalah kejayaan dan penghargaan atau penghormatan yang dianugerahkan karena telah melayani dan melindungi masyarakat atau negara.¹⁸

Mereka tidak bisa memiliki keluarga sepribadi kelas para pekerja tangan dan tukang. Anak-anak mereka ditanggung negara dan dididik dalam rumah-rumah umum, tempat-tempat pendidikan anak, dan sekolah-sekolah. Ibu-ibu mereka bahkan tidak

¹⁴ *Ibid.*, 580d-581a.

¹⁵ Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy*, 23-24.

¹⁶ Plato, *Republic*, 433a-b, 434c.

¹⁷ Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy*, 24.

¹⁸ *Ibid.*, 24-25.

bisa mengetahui tentang keadaan anak-anak mereka. Begitu lahir, anak-anak sampai usia tujuh tahun diserahkan kepada perempuan-perempuan yang secara khusus terlatih dalam perawatan anak. Setelah dewasa mereka dijodohkan berdasarkan watak yang diwarisi. Laki-laki diperbolehkan menjadi bapak antara usia tiga puluh sampai lima puluh lima tahun, sementara perempuan boleh menjadi ibu antara usia dua puluh dan empat puluh tahun.¹⁹

Kelas hakim atau pengatur, sama seperti kelas tentara, tidak memiliki kehidupan pribadi seleluasa kelas pekerja. Mereka sepenuhnya mengabdikan pada masyarakat atau negara. Hidupnya bukan untuk dirinya, tetapi hidupnya untuk memikirkan keutuhan dan kedamaian masyarakatnya.²⁰

Mereka dalam kelas ini direkrut dari kelas warganegara tentara. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan intelektual. Mereka hanya memiliki kewajiban menjalankan pekerjaan-pekerjaan hakim setelah usia mereka mencapai lima puluh tahun. Selama dua puluh tahun sebelumnya, mereka dididik dan dilatih filsafat dan tugas-tugas praktis kehidupan. Selama keseluruhan periode ini dan setelah mereka menjadi hakim atau penguasa negara, mereka harus menjalani suatu perlakuan keras disiplin fisik dan intelektual, tinggal di tenda-tenda, tidak punya hak milik sendiri, tidak memiliki emas atau perak, dan harus ditopang tanpa kemewahan oleh masyarakatnya. Fungsi mereka sedikit berbeda dengan apa yang kita bayangkan dengan penguasa-penguasa politik. Tugas umum mereka adalah mengupayakan kebaikan umum masyarakatnya. Mereka menjalankan dan mengumumkan secara resmi hukum-hukum dan termasuk melakukan penjodohan antara laki-laki dan perempuan. Tugas paling utama mereka adalah menjadi guru bagi generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi filosof dan negarawan, tetapi juga menjadi orang di atas semua guru.²¹

Kelas pertama tidak merangkap pekerjaan sebagai kelas kedua atau ketiga, demikian juga dua kelas lainnya. Kelompok-kelompok ini meskipun menjalani pekerjaan masing-masing, namun dapat bekerjasama dalam suatu sistem yang adil. Kelompok pertama menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang dengan adil dalam pertukaran ekonomi di antara mereka karena dilindungi oleh kelas kedua, yakni *the warriors* atau *the honor-loving guardians*, dan keduanya saling memaklumi tugasnya masing-masing karena pengetahuan yang diberikan oleh raja-raja atau penguasa-penguasa penyinta kebijaksanaan (*wisdom-loving kings*).²²

Untuk mewujudkan masyarakat ideal, pendidikan menjadi kunci untuk perwujudannya. Kesempatan pendidikan untuk anak-anak dan setiap warga sama baik laki-laki maupun perempuan. Dalam filsafat Plato, terdapat pandangan persamaan antara perempuan dan laki-laki. Akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik terbuka dengan peluang yang sama bagi warga negara perempuan maupun laki-laki. Pendidikanlah yang menentukan apakah mereka akan menempati kelas sosial pertama,

¹⁹ *Ibid.*, 25.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, 26.

²² Plato, *Republic*, 462e-463b.

kedua, atau ketiga. Jadi, Pendidikan juga berperan sebagai media penempatan kelas sosial.

Dua kelas terakhir, yaitu kelas tentara dan kelas hakim dan pemimpin masyarakat, dibekali pengetahuan filsafat. Semakin tinggi pengetahuan filsafatnya semakin menduduki posisi puncak dalam kelas pemimpins. Pemimpin ideal negara adalah filosof, Plato berpandangan bahwa sebelum filosof-filosof menjadi raja-raja, atau sebelum para raja atau para pangeran memiliki semangat dan kekuatan filosof, maka suatu masyarakat atau negara tidak akan pernah berhenti menemui kekacauan sosial maupun rasialisme manusia.

Tujuan ditulisnya *The Republic* adalah untuk mendiskusikan hakikat keadilan dalam pikiran banyak orang dan mendorong bermasyarakat yang adil.²³ Dia memahami keadilan sebagai suatu hubungan di antara individu-individu yang bergantung pada organisasi sosial. Organisasi sosial yang baik hanya bisa diatur dan dikendalikan oleh negarawan yang sekaligus filosof. Dalam pemikiran Plato, hanya dalam suatu negara atau masyarakat yang adil, keadilan dapat direalisasikan, dan orang yang adil hanya ada dalam masyarakat yang adil.²⁴

Dalam karyanya *The Laws*, Plato membicarakan tentang semacam konstitusi praktis untuk negara-negara kota Yunani, yang dia sendiri menyebutnya "*a second best commonwealth*." Dalam tulisan ini, dia juga menjelaskan lima tahap perkembangan masyarakat manusia. Yang pertama, tahap keluarga yang terisolasi hidup berburu dan berpindah-pindah. Yang kedua, tahap masyarakat patrialkhal, keluarga dikonsolidasi atas dasar klan dan suku. Yang ketiga adalah tahap masyarakat agrikultural. Yang keempat adalah tahap masyarakat Perdagangan. Yang kelima adalah tahap masyarakat campuran agrikultural dan perdagangan seperti Athena dan Sparta.²⁵ Athena dan Sparta, bagi Palto, merupakan contoh negara ideal. Idealitas negara-negara (kota-kota) ini tidak hanya dilihat dari segi penggabungan agrikultur dan perdagangan, tetapi juga dilihat dari penjunjungtinggian kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan. Kepentingan bersama yang diwakili oleh negara merupakan kepentingan yang paling tinggi, dan kemerdekaan negara lebih penting daripada kemerdekaan perseorangan.²⁶

Agungnya kepentingan bersama, misalnya, terlihat dari adanya pembatasan hak milik pribadi. Negara menentukan jumlah kepemilikan demi terwujudnya keadilan untuk semua dan demi penghindaran kemiskinan bagi warga negara. Kehidupan keluarga dipandang dengan bentuk monogami dan mendapatkan hak milik pribadi. Hak milik pribadi dibatasi dalam jumlah. Negara menentukan jumlah minimum hak milik pribadi setiap warganya, dengan menghindari kemiskinan. Kelas pekerja, seperti petani, nelayan, pedagang, dan perajin mendapat satu bagian. Kelas militer atau tentara mendapatkan

²³ Leo Strauss and Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy*, 8.

²⁴ Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy*, 29.

²⁵ *Ibid.*, 30-31.

²⁶ Mohammad Hatta, *Alam Pemikiran Yunani* (Jakarta: Penerbit Tintamas Indonesia, 1980), 109.

kesejahteraan dua kali lipat dari kelas pekerja. Kelas pengelola negara, seperti para hakim dan aparaturnya memperoleh penghasilan tiga kali lipat dari kelas pekerja. Kelas pemimpin negara adalah empat kali lipatnya. Pembuatan undang-undang ini dilakukan oleh sedikit orang yang dipilih dari kelas pengelola negara.²⁷

Peraturan yang menjadi dasar untuk semua tidak boleh diputuskan oleh individu-individu ataupun oleh keseluruhan warga, kesepakatan dari tiga kelas sosial-politik, namun ditentukan oleh suatu ajaran berdasarkan pengetahuan dengan kebijaksanaan. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintahan harus dipimpin oleh ide tertinggi, yaitu ide kebaikan. Tujuan pemerintah yang benar adalah mendidik warga negaranya memiliki pengetahuan mengenai ide kebaikan sebagai kebenaran yang dimunculkan oleh kebijaksanaan dari pengetahuan. Negara harus dikuasai oleh kebijaksanaan ini, dan karena orang yang menguasai pengetahuan tentang keutamaan tertinggi ini adalah filosof, maka negara harus dipimpin oleh raja yang filosof. Ucapan terkenal Plato, seperti dikutip Hatta, mengenai hal ini, bahwa kesengsaraan dan kekacauan dunia tidak akan berakhir sampai datang filosof sebagai raja atau pemimpinnya.²⁸

Karyanya *The Statesman* berisi bentuk-bentuk kepastian konstitusi politik yang bisa berupa kekuasaan oleh satu, beberapa, atau banyak orang. Plato tampak memberikan kemungkinan bentuk kekuasaan dan pemerintahan, yang penting semuanya harus di bawah suatu konstitusi yang membatasi kekuasaan. Bentuk kekuasaan dan pemerintahan bisa monarki (kekuasaan satu orang) tetapi di bawah konstitusi. Monarki tanpa konstitusi bisa menjadi tirani. Bentuk kekuasaan dan pemerintahan bisa aristokrasi (kekuasaan oleh sedikit orang) tetapi tetap di bawah konstitusi. Aristokrasi tanpa konstitusi bisa menjadi oligarki yang *selfish* atau egoistik dan korup. Bentuk kekuasaan dan pemerintahan bisa juga demokrasi (kekuasaan banyak orang) tetapi tetap di bawah konstitusi. Demokrasi tanpa konstitusi lebih tidak bisa ditolerir ketimbang tirani dan oligarki. Prinsipnya, kekuasaan dan pemerintahan harus merupakan suatu kekuasaan hukum, bukan suatu kekuasaan orang atau kelompok orang.²⁹

D. Bangunan Filsafat Sosial-Politik Aristoteles

Menurut Aristoteles, berkelompok adalah sesuatu yang alamiah sifatnya bagi manusia, karena manusia adalah *zon politicon*, *a political animal*. Di tempat lain dia mengatakan bahwa manusia adalah juga sebagai *a rational animal*. Ellwood dalam tulisannya *A History of Social Philosophy* menerjemahkan aporisme terkenal Aristoteles ini dengan *man is naturally a community animal* (manusia secara alamiah adalah binatang yang bermasyarakat).³⁰ Aristoteles mengakui bahwa kehidupan sosial binatang pada umumnya, tetapi manusia adalah binatang sosial dalam pengertian yang

²⁷ Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy*, 32.

²⁸ Mohammad Hatta, *Alam Pemikiran Yunani*, 109-110.

²⁹ Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy*, 33.

³⁰ *Ibid.*, 43.

lebih tinggi daripada sekumpulan lebah yang memiliki pengorganisasian yang rapi dan saling mendukung. Perbedaan dengan binatang umumnya terletak pada rasionalitas yang dimiliki oleh manusia. Dengan rasionya manusia bisa mengkomunikasikan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan mengupayakan solusi-solusinya.

Manusia sebagai makhluk sosial, bagi Aristoteles, terbukti dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun di dalam menghadapi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurutnya, asal-usul sosialitas manusia dimulai dari dua hubungan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Hubungan yang pertama untuk reproduksi dan regenerasi manusia, dan hubungan yang kedua menggambarkan kebutuhan manusia tentang keselamatan bersama.

Dari hubungan-hubungan itu kemudian berkembang hubungan yang lebih besar, rumah tangga. Rumah tangga menghasilkan usaha-usaha rumah tangga untuk keperluan hidup sehari-hari manusia. Hubungan antar rumah tangga-rumah tangga berkembang ke dalam kelompok-kelompok sosial yang lebih besar, seperti masyarakat desa, dan sampai terbentuknya *polis* atau *city-state* (negara-kota) yang terdiri dari asosiasi antar desa-desa. Menurutnya, *polis* adalah pertumbuhan sosial secara alamiah dari asosiasi antar manusia.

Perkembangan dari asosiasi-asosiasi antar manusia dalam bentuknya yang terkecil sampai dengan terbentuknya *polis* atau secara umum dalam konteks masyarakat sekarang disebut negara menggambarkan bahwa masyarakat mempunyai suatu organisasi politis. Kelihatan dengan jelas dalam pemikiran Aristoteles bahwa dorongan ke arah asosiasi politis atau pengorganisasian secara politis ini adalah bawaan dari manusia, sehingga orang tidak bernegara (*stateless man*), orang yang tidak tinggal dalam masyarakat yang terorganisir, hanyalah orang super atau orang yang sangat rendah dalam skala perkembangan.

Motif dari mengorganisir hubungan-hubungan antar manusia ke dalam suatu negara adalah keuntungan umum bersama yang bisa didapat dan diturunkan darinya. Kehidupan sosial yang terorganisir adalah mendasar bagi eksistensi manusia sebagai manusia. Orang yang tidak membutuhkan kehidupan sosial seperti ini adalah orang yang brutal atau mungkin seorang dewa.³¹ Negara atau komunitas keberadaannya mendahului individu, karena keseluruhan harus mendahului bagian-bagiannya. Individu-individu tanpa ikatan sosial dalam suatu komunitas adalah tidak mungkin. Hidup berkomunitas sosial atau berpolitik adalah instingtif dalam setiap diri manusia. Aristoteles menyatakan hal ini sebagai berikut:

A social instinct is implanted in all men by nature, and yet he who first founded the state was the greatest of benefactors. For man, when perfected, is the best of animals, but, when separated from law and justice, he is the worst of all; since armed injustice is the more dangerous, and he is equipped at birth with arms, meant to be used by intelligence and virtue, which he may use for the worst ends. Wherefore, if he have not virtue, he is

³¹ Aristoteles, *The Politics, Book One*, trans by Benjamin Jowett (Kitchener: Batoche Books, 1999), 4.

the most unholy and the most savage of animals, and the most full of lust and gluttony. But justice is the bond of men in states, for the administration of justice, which is the determination of what is just, is the principle of order in political society.³²

(Suatu insting sosial ditanamkan dalam semua manusia secara alamiah, dan oleh karenanya dia yang pertama mendirikan negara adalah yang terbesar dari dermawan-dermawan. Karena manusia, ketika sempurna, merupakan yang terbaik dari binatang, tetapi, ketika terpisah dari hukum dan keadilan, dia adalah yang terburuk dari semuanya. Karena ketidakadilan yang dipersenjatai adalah lebih berbahaya, dan dia dilengkapi sejak lahir dengan *arms*, yang dimaksudkan untuk digunakan dengan kecerdasan dan keutamaan, yang dia bisa pakai untuk tujuan-tujuan paling buruk. Mengapa, jika dia tidak memiliki keutamaan, dia adalah yang paling tidak suci dan paling biadab dari binatang-binatang, dan yang paling penuh nafsu jahat kerakusan. Namun keadilan adalah ikatan orang-orang dalam negara-negara, karena penggunaan keadilan, yang merupakan ketentuan dari apa yang adil, merupakan prinsip dari tata-tertib dalam masyarakat politis.)

Di dalam organisasi sosial, seperti dijelaskan Aristoteles dalam karyanya *Politics* Buku I, didapati hubungan-hubungan antara majikan dan budak, suami dan isteri, orang tua dan anak, dan ilmu atau seni mendapatkan uang. Aristoteles mengakui dan melegitimasi perbudakan. Teori perbudakannya kembali kepada pandangannya tentang alam yang di dalamnya juga ada prinsip kekuasaan dan penundukan. Di dalam masyarakat, orang-orang yang memandang hidup sebagai budak adalah menguntungkan dan adil. Dengan menyerahkan penguasaan dirinya kepada kekuasaan orang lain sebagai majikannya, orang merasa diuntungkan dengan mendapatkan apa yang diperlukannya, dan majikan juga diuntungkan karena banyak pekerjaan yang tidak mungkin dilakukannya bisa diselesaikan oleh budak.³³

Perbudakan seperti ini adalah alamiah sifatnya. Inilah yang disebutnya dengan *natural slavery*. *Natural slavery* berbeda dengan *legal slavery*. *Natural slavery* adalah menguntungkan dan adil karena mengikuti aturan alam (*Nature's ordinance*); hubungannya adalah hubungan saling membantu (*mutual helpfulness*) dan saling berteman (*mutual friendshipness*) antara majikan dan budak. Karena memang sebagian manusia secara alamiah adalah bebas, dan sebagian yang lain adalah tidak bebas atau budak.³⁴ Namun, *legal slavery* bisa salah dan bisa benar. Salah karena ketergantungan pada hukum atau kekuatan yang dibuat menyimpang jauh dari prinsip natural, yaitu hukum dan kekuatan yang memaksa dan menekan budak. Benar karena hukum dan kekuatan itu masih dalam prinsip natural.³⁵

Aristoteles memahami hubungan antara suami dan isteri bukan merupakan hubungan antara raja dan rakyatnya. Laki-laki menurutnya adalah superior atas perempuan, dan karenanya ia adalah kepala rumah tangga. Isteri harus mematuhi. Tetapi hubungan ini, yakni suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri harus patuh,

³² *Ibid.*

³³ Leo Strauss and Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy*, 75.

³⁴ Aristotle, *Politics Book One*, 7.

³⁵ Charles A. Ellwood, *A History of Social Philosophy*, 45-46.

lebih dipahami Aristoteles sebagai hubungan persamaan moral. Karena apa yang dilakukan oleh suami harus mempertimbangkan kepentingan sang isteri dan anak-anaknya. Hubungan suami, isteri dan anak-anak baginya tampak seperti hubungan penguasa dengan yang dikuasai di bawah suatu bentuk pemerintahan yang konstitusional. Kekuasaan atas isteri dan anak-anak adalah kekuasaan atas orang-orang bebas, kalau bagi isteri kekuasaan suami itu bersifat konstitusional, sedangkan bagi anak-anak ia bersifat agung seperti raja. Dia mengatakan, “For although there may be exceptions to the order of nature, the male is by nature fitter for command than the female, just as the elder and full-grown is superior to the younger and more immature.”³⁶ (Karena walaupun bisa ada pengecualian-pengecualian ada ketertiban alam, laki-laki secara alamiah lebih cocok untuk memerintah daripada wanita, sebagaimana yang lebih tua dan yang tumbuh lebih dewasa adalah superior atas yang lebih muda dan yang kurang dewasa.). “Clearly, then, moral virtue belongs to all of them; but the temperance of a man and of a woman, or the courage and justice of a man and of a woman, are not, as Socrates maintained, the same; the courage of a man is shown in commanding, of a woman in obeying.”³⁷ (Maka jelas, keutamaan moral milik semua dari mereka, tetapi perwatakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau keberanian dan keadilan seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti dipegangi Socrates, adalah tidak sama; keberanian seorang laki-laki ditunjukkan dalam memerintah, dan keberanian seorang wanita diperlihatkan dalam mematuhi.).

Yang menarik dan unik dari filsafat sosial Aristoteles adalah tentang seni mendapatkan uang atau penghasilan. Dia tidak setuju terhadap perolehan uang demi uang itu sendiri. Harus ada batas tertentu bagi kepemilikan orang, yaitu jumlahnya harus cukup untuk kemandirian dan hidup dengan cukup baik, tetapi tidak berlebihan. Dia menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap perdagangan dan pengejaran komersial, karena dia meyakini bahwa hasil-hasil agrikultur adalah satu-satunya sumber kemakmuran sejati. Perolehan uang oleh karena itu mengikuti alam, katanya, bergantung secara universal pada buah-buah dari bumi dan binatang-binatang.³⁸

Dapat dimengerti bahwa Aristoteles, sebagaimana diuraikan dalam karyanya *Politics* Buku II, menyetujui adanya hak milik pribadi. Namun baginya, hak milik pribadi ini harus terbatas dan diatur oleh negara. Dibatasi oleh peraturan negara, karena baginya negara sebagai kesatuan masyarakat manusia lebih merupakan kesatuan moral daripada kesatuan mekanik.³⁹

Aristoteles menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan adalah suatu alternatif. Menurutny ada enam bentuk fundamental negara dilihat dari banyaknya orang yang menggunakan kedaulatan dan menurut apakah pemerintahan itu sendiri baik atau buruk, bersih atau korup. Keenam bentuk negara itu adalah yang pertama, pemerintahan oleh satu orang, apabila penguasa tunggalnya (seorang raja) adalah baik maka akan

³⁶ Aristotle, *Politics Book One*, 14.

³⁷ *Ibid.*, 15.

³⁸ *Ibid.*, 47.

³⁹ *Ibid.*, 48.

muncul suatu pemerintahan monarki yang baik, namun apabila penguasa tunggalnya memaksakan kehendak seenaknya sendiri maka keburukan akan terjadi, yaitu suatu tirani; yang kedua, pemerintahan oleh sedikit orang, ketika baik disebut aristokrasi, ketika buruk disebut oligarki; yang ketiga, kekuasaan oleh banyak orang, baik ataupun buruk, disebut demokrasi. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dikontrol oleh hukum fundamental atau konstitusi, suatu republik konstitusional. Dari bentuk-bentuk itu tidak ada satu bentuk tertentu disebut terbaik dari yang lainnya. Monarki baik asal rajanya orang bijak, baik dan adil, kalau tidak monarki berubah menjadi tirani. Aristokrasi baik asal orang-orang kaya dan pintar tidak mementingkan tujuan-tujuan egoistik mereka. Jika tujuan-tujuan egoistik mereka yang dikedepankan, maka aristokrasi berubah menjadi oligarkhi. Demokrasi baik apabila keterlibatan publik secara menyeluruh diutamakan untuk menemukan kehendak umum mereka, jika hanya datang dari sekelompok kelas sosial tertentu maka demokrasi akan menjadi buruk.⁴⁰ Namun untuk orang-orang Yunani, dalam pemikiran Aristoteles, bentuk republik konstitusional merupakan bentuk terbaik.⁴¹

Dalam filsafat sosial Aristoteles, negara harus mengondisikan suatu kehidupan yang baik (*well-living*). Negara tidak semata berurusan dengan pemajuan perdagangan dan masalah perlindungan, tetapi yang jauh lebih fundamental, ia harus menciptakan kemakmuran sosial (*social welfare*) yang dilandaskan pada moralitas yang baik. Kemakmuran tidak sekedar terpenuhi kebutuhan fisik-material, melainkan harus menghadirkan yang baik atau suatu etika sosial dalam kehidupan manusia dalam suatu negara.

Kehidupan yang baik bukan merupakan hal yang baik bagi individu saja, atau bagi negara saja, atau satu hal baik bagi individu dan hal lain baik bagi negara. Yang baik harus berlaku baik bagi individu maupun negara. Ada tiga unsur kebaikan sosial atau kehidupan yang bahagia, yaitu kebaikan-kebaikan eksternal atau kemakmuran, kebaikan-kebaikan tubuh atau kesehatan, dan kebaikan jiwa atau intelegensi. Individu yang bahagia adalah dia yang memiliki ketiganya secara proporsional. Dia menggunakan instrumen-instrumen produksi dengan baik yang dengannya penghidupan yang baik didapatnya. Dengan cara ini pula dia mencapai kebahagiaan jasmani, yakni terpenuhinya kebutuhan material dan mendapatkan kesehatan fisik. Namun, kebahagiaan dua jenis pertama memiliki batas-batasnya, dan karenanya manusia harus mencapai kebaikan tertinggi, yaitu kebaikan jiwa atau intelegensi dan karakter moral, yang dalam pandangannya, tidak memiliki batas. Sama halnya dengan negara, negara yang baik atau sempurna adalah negara yang memberikan ketiga kebaikan tersebut dengan penekanan terpenting pada kebahagiaan jiwa atau pikiran.⁴²

Dalam pemikiran Aristoteles tampak jelas bahwa tujuan negara adalah untuk menghasilkan warga-warga negara yang baik yang memerankan dimensi sosial

⁴⁰ *Ibid.*, 49-50.

⁴¹ *Ibid.*, 50.

⁴² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 19-23.

mereka. Negara, oleh karenanya, harus diorganisasikan dan dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi setiap warganya menjadi sepenuhnya baik. Ketika negara tidak mengondisikan atau menjadikan mudah bagi setiap warganya memperoleh kehidupan yang utama dan bahagia, maka negara telah melakukan kejahatan.⁴³

E. Analisis Komparatif-Filosofis Sosial-Politis

Filsafat sosial-politik Plato dan Aristoteles memiliki kesamaan mengenai suatu kehidupan antar manusia dengan manusia lain yang secara sosial menggambarkan suatu masyarakat yang baik untuk semuanya dan yang secara politis memerlukan suatu institusi yang diberi otoritas untuk mengatur setiap warga berbuat sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, yaitu terbangunnya kehidupan yang adil dan sejahtera untuk semua. Filsafat sosial-politik keduanya berangkat dari asumsi dasar yang agak berbeda, namun akar hakikat filosofisnya sama. Plato memulai dengan pandangan mengenai masyarakat ideal, sedangkan Aristoteles berangkat dari pandangan mengenai hakikat manusia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial-politik. Berbeda karena yang satu, masyarakat (Plato), dan yang lain, manusia (Aristoteles); namun sebenarnya mirip, karena masyarakat ideal, dalam pandangan Plato, hanya akan tercipta kalau lahir dan diatur oleh manusia ideal, dan manusia sebagai *social-political being*, dalam pandangan Aristoteles, pasti akan mengarah pada suatu pengorganisasian hidup antar manusia ke dalam suatu masyarakat ideal.

Baik Plato maupun Aristoteles sama-sama memandang penting mengenai keluarga sebagai bagian tak terpisahkan dari sosialitas manusia. Aristoteles memandang keluarga sebagai satuan sosial terkecil, yang darinya hubungan-hubungan sosial lebih besar dibentuk, mulai dari hubungan antar keluarga-keluarga, hubungan-hubungan antar kelompok-kelompok sosial, hingga membentuk suatu negara. Negara merupakan pengorganisasian sosial-politik tertinggi yang tujuan pembentukannya adalah untuk keuntungan baik bagi warga maupun negara. Negara, dengan upayanya melahirkan kebahagiaan jasmani, jiwa, dan intelektual bagi setiap warganya, telah memperoleh keuntungan bagi dirinya. Sementara Plato hanya memberi karakter nilai dari eksistensi suatu keluarga yang dicirikan prinsip monogami, merdeka dan berhak atas kepemilikan properti. Dengan pandangan ini, Plato lebih suka berbicara mengenai klasifikasi kelas sosial ke dalam tiga kelompok seperti telah diurai di atas, daripada memahami keluarga sebagai awal evolusi perkembangan sosial yang berlabuh pada konsep negara seperti dalam pemikiran Aristoteles. Dalam filsafat Plato tampak jelas bahwa masyarakat ideal adalah interrelasi antar tiga kelas sosial dengan ciri keluarga-keluarga yang menghuni masing-masing kelas yang berbeda-beda, di mana ciri-ciri unik masing-masing kelas ini bukan tanpa desain, karena dikendalikan oleh negara yang dikemudikan oleh manusia paling ideal, yaitu filosof.

⁴³ S.E. Frost, Jr, *Basic Teachings of the Great Philosophers* (New York: Barnes & Noble, Inc., 1957), 204.

Kedua filosof Yunani murid Socrates ini sama dalam hal pembatasan hak milik warga masyarakat oleh negara. Perbedaan keduanya hanya pada cara pembatasan yang harus dilakuka oleh negara. Dalam menjelaskan pembatasan hak milik warga oleh negara, Plato menggunakan pendekatan kuantitatif, sangat detil perbedaan kebolehan perolehan hak milik oleh ketiga kelas sosial, sementara Aristoteles menerapkan pendekatan kualitatif, yakni hak milik tidak boleh berlebihan tetapi juga tidak kekurangan, melainkan bisa untuk kemandirian hidup yang layak untuk setiap keluarga. Dari pandangan mengenai kehidupan ekonomi warga yang dibatasi penguasaan kepemilikannya bisa disimpulkan bahwa filsafat sosial-politik keduanya sama-sama tidak menyokong prinsip politik kapitalisme liberal dan tidak juga menyarankan menerapkan sosialisme total. Keduanya tetap memberi ruang kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi namun dibatasi dalam penguasaan hak milik pribadi.

Politik ekonomi dewasa ini lebih condong pada penguatan kapitalisme yang memberi kebebasan tanpa batas dalam penguasaan hak milik pribadi. Satu orang dimungkinkan memiliki kekayaan tanpa batas, bisa saja menguasai alat produksi tanpa batas, sementara banyak orang tidak bisa melakukan hal yang sama karena ketidakadilan akibat dari keberpihakan politik pada kelas-kelas pemilik alat produksi. Filsafat sosial-politik Plato dan Aristoteles bisa dipakai untuk memikirkan ulang dan merenungkan kembali cara-cara yang lebih berkeadilan melalui penyegaran tafsir atas teori pembatasan penguasaan hak milik pribadi dalam konteks kekinian. Filsafat politik yang menggabungkan penghargaan kebebasan individu dan persamaan kesejahteraan bisa didorong dilahirkan ke depan dengan modernisasi teori atas teori kedua filosof ini.

Hubungan antara perempuan dan laki-laki muncul dalam filsafat sosial-politik keduanya. Ada yang menarik di sini, yaitu bahwa Plato lebih memiliki pandangan yang berkesetaraan gender, sementara Aristoteles cenderung menunjukkan bias gender. Plato lebih berani menyatakan bahwa kehidupan keluarga harus berprinsip monogami, sedangkan dalam pemikiran Aristoteles tidak ada ketegasan konsepsi mengenai hal ini, apakah dia berdiri pada prinsip monogami atau berdiri pada prinsip poligami. Bagi Plato, perempuan dan laki-laki adalah sama dan harus diberi peluang yang sama untuk mengakses pendidikan dan kehidupan sosial-politik, sementara dalam pandangan Aristoteles, laki-laki dalam hubungannya dengan perempuan adalah lebih superior, meskipun makna superiorinya tidak dalam arti negatif, melainkan tetap dimaknai positif yaitu mempertimbangkan perlakuan yang baik terhadap perempuan.

Perbedaan pandangan keduanya dari segi kesetaraan gender ini bisa dimengerti dari segi historisitas kehidupan keduanya. Plato boleh dibilang merupakan seorang filosof yang kehidupannya di luar istana atau jauh dari lingkaran kekuasaan politik, sementara Aristoteles merupakan filosof yang hidup lama di dalam istana atau hidup dalam atmosfir kebiasaan politis dalam lingkaran kekuasaan elit politik. Plato, karena kasus gurunya, Socrates, bepergian menjauh dari Athena untuk melanjutkan pengajaran mengenai kebijaksanaan hidup. Dia bebas di alam bebas, pemikirannya dipenuhi oleh cita-cita pikiran ideal yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan politik di dalam istana, sehingga tidak heran jika pandangannya mengenai keberadaan perempuan dan laki-

laki dalam domain kehidupan sosial-politik memperlihatkan suatu keadilan gender. Aristoteles, yang mengajari anak raja sejak mudanya berbagai ilmu dan filsafat, sangatlah mengerti atau bahkan terbiasa dengan kehidupan politik elit kekuasaan di dalam istana. Kultur feodalisme kerajaan memberinya pandangan yang biasa mengenai keunggulan laki-laki di atas perempuan dan mengenai kehidupan keluarga elit kekuasaan dengan banyak isteri. Barangkali kebiasaan hidup politik dalam lingkaran elit kekuasaan di dalam istana berpengaruh dalam produksi filsafat sosial-politiknya mengenai hubungan antara perempuan dan laki-laki yang agak bias gender.

Plato dan Aristoteles juga memiliki kesamaan pandangan dalam hal bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan apapun sama saja, bisa baik dan bisa buruk. Tidak ada bentuk pemerintahan yang lebih baik antar satu dengan yang lainnya. Pendeknya bagi keduanya, bentuk pemerintahan adalah bersifat alternatif. Bentuk pemerintahan oleh satu orang, beberapa orang, atau banyak orang, menurut Aristoteles, bisa baik dan bisa buruk bergantung pada karakter penguasanya apakah baik atau tidak. Plato sama dengan Aristoteles dalam hal bahwa semua bentuk pemerintahan bisa baik dan bisa buruk, namun dia berbeda dalam alasannya. Bagi Plato, yang menyebabkan bentuk pemerintahan apapun bentuknya apakah oleh satu orang, beberapa orang, ataukah banyak orang berjalan dengan baik adalah adanya konstitusi yang dirumuskan dari pikiran-pikiran bijaksana para penguasa yang filosof. Aristoteles sependapat mengenai konstitusi sebagai basis peraturan bersama. Konstitusi merupakan perwujudan kemauan bersama antar warga sosial sebagai bentuk kebutuhan dari proses sosial individu-individu untuk mewujudkan keadilan yang sebesar mungkin bagi para warga negara. Tanpa konstitusi semua bentuk pemerintahan pasti berjalan secara negatif, yaitu tidak mampu mewujudkan keadilan dan kebaikan untuk semua.

F. Kesimpulan

Filsafat sosial-politik Plato dan Aristoteles menggambarkan teori sosial-politik yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan suatu negara atau masyarakat yang adil (*a just city-state*) untuk menciptakan kebahagiaan bagi setiap warganya. Keduanya sepakat dalam tujuan ini, namun berbeda dalam sumber perwujudannya. Bagi Plato, tujuan sosial-politik itu tercapai, jika dan hanya jika didasarkan pada pengetahuan ideal yang diproduksi oleh para pemimpin yang filosof, dan menurut Aristoteles, tujuan itu bergantung pada terwujudnya warga-warga negara yang baik yang merupakan tanggungjawab dari negara yang merupakan puncak proses sosial dari interaksi antara manusia untuk melindungi kebutuhan-kebutuhan mereka. Teori sosial-politik Plato sangatlah idealistis. Negara yang adil bergantung pada pengetahuan ideal yang lahir dari manusia ideal, manusia sempurna, yaitu para filosof. Di tangan kendali filosof, keadilan dijamin berjalan. Teori sosial-politik Aristoteles merupakan *the good citizenship based politic*. Kebaikan sosial dalam keseluruhannya ditentukan oleh kebaikan sosial setiap warganya, dan negara berkewajiban untuk mewujudkannya.

Dalam teori keduanya didapati kesamaan juga dalam hal pembatasan kepemilikan pribadi oleh negara. Dalam hal penguasaan kekayaan, teori politik keduanya jauh dari

mengesankan suatu membenaran atas kapitalisme yang mendorong kebebasan individu dalam menguasai kekayaan. Pembatasan ini di sisi lain mengesankan suatu sosialisme, namun bukan dalam pengertian kekayaan ekonomi dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Negara memiliki wewenang mengatur penguasaan kekayaan untuk kelompok-kelompok warganya demi terwujudnya keadilan sosial.

Perbedaan kondisi dalam melahirkan pemikiran sosial-politik, di mana Plato adalah pemikir luar istana, sedangkan Aristoteles adalah pemikir dalam istana, berimplikasi pada kesan bias kesetaraan dalam memandang eksistensi perempuan dan laki-laki. Plato terkesan lebih berkesetaraan ketimbang Aristoteles.

Daftar Pustaka

- Aristoteles, *The Politics, Book One*, Trans by Benjamin Jowett (Kitchener: Batoche Books, 1999).
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, Trans. with introd. and notes by Martin Ostwald, (Indianapolis, New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1962).
- Blackburn, Simon, *The Oxford Dictionary of Philosophy* (Oxford, New York: Oxford University Press, 1994).
- Durant, Will, *The Story of Philosophy. The Lives and Opinions of the World's Greatest Philosophers from Plato to John Dewey*, (New York: Pocket Books, Inc., 1954).
- Ellwood, Charles A, *A History of Social Philosophy*, (New York: AMS Press, 1969).
- Hatta, Mohammad, *Alam Pemikiran Yunani*, (Jakarta: Penerbit Tintamas Indonesia, 1980).
- Klosko, George. "Politics and Method in Platos's Political Theory." *Journal POLIS*, Vol. 23, 2006.
- Laslett, Peter and Cummings, Philip W.. "History of Political Philosophy" dalam Paul Edwards (ed. in chief), *The Encyclopedia of Philosophy*, (New York & London: The Macmillan Company & The Free Press & Collier-Macmillan Limited, 1967).
- Plato. *Republic*, Trans. from the standard Greek text, with introd., by C.D.C. Reeve. (Indianapolis: Hackett Publishing, Inc., 2004).
- Strauss, Leo and Cropsey, Joseph. *History of Political Philosophy*, (Chicago and London: The University Chicago Press, 1973).